BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Masalah *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya (Ditjen Kesmas, 2024). Meski prevalensi *stunting* di Indonesia menurun menjadi 21,6% pada 2022 (SSGI), angka ini masih di atas standar WHO (<20%) dan target nasional 2024 (14%). Salah satu penyebab utama *stunting* adalah kurangnya asupan gizi selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penanganan *stunting* harus dilakukan secara holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pemberdayaan ibu balita sebagai pengelola gizi keluarga menjadi strategi penting, di mana peran organisasi dan komunitas seperti PKK, kader posyandu dan dasawisma dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting*.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan perilaku individu atau kelompok yang aktif memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, seperti pikiran (saran, pendapat), keterampilan, tenaga, maupun materi dalam upaya penanggulangan masalah *stunting* (Asri, 2021).

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dipengaruhi oleh pola pikir positif, ketersediaan fasilitas, akses pelayanan kesehatan, dan sosialisasi yang merata (Journal of Muslim Community Health, 2023). Persepsi orang tua tentang pentingnya kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi (Kartika, 2023). Selain itu, pendidikan dan penghasilan turut memengaruhi kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan (Indrayati, 2013). Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar program kesehatan berjalan efektif.

Namun, ada juga faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, seperti sikap apatis, rendahnya kepercayaan terhadap penanggulangan masalah gizi, kendala geografis, dan kurangnya informasi tentang biaya pelayanan kesehatan (Poltekkes Jogja, 2020; Wardhana et al., 2022). Hambatan ini perlu diatasi melalui edukasi dan peningkatan akses informasi agar partisipasi masyarakat dapat meningkat.

c. Bentuk partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan *stunting* meliputi berbagai bentuk, antara lain partisipasi dalam bentuk uang, harta benda, tenaga, keterampilan, buah pikiran, sosial, pengambilan keputusan, dan representatif. Partisipasi uang merupakan kontribusi finansial untuk mendukung pemenuhan

kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda melibatkan sumbangan barang seperti alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah kontribusi dalam bentuk tenaga kerja untuk mendukung keberhasilan program. Partisipasi keterampilan mencakup pemberian dorongan melalui kemampuan yang dimiliki anggota masyarakat. Partisipasi buah pikiran berupa ide, pendapat, atau pemikiran konstruktif untuk menyusun atau memperlancar pelaksanaan program. Partisipasi sosial mencerminkan kebersamaan dan keguyuban dalam kegiatan seperti arisan, pengajian, atau menghadiri acara kematian (Sari et al., 2021; Putri & Wahyuni, 2022).

Dalam konteks penanggulangan *stunting*, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menurunkan angka *stunting* di komunitas. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan kondisi bayi dengan bekerja sama bersama aparat kalurahan dan tenaga kesehatan seperti bidan kalurahan. Penyuluhan kesehatan kepada ibu balita tentang tanda-tanda *stunting* terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesiapan mereka dalam pencegahan *stunting* (Putri & Wahyuni, 2022). Selain itu, pengembangan program gizi seimbang seperti “Isi Piringku” yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan membantu meningkatkan asupan gizi ibu hamil dan anak-anak. Kebersihan dan sanitasi lingkungan juga harus dijaga untuk mencegah *stunting* (Sari et al., 2021).

Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan pengembangan

posyandu yang efektif menjadi sarana penting dalam pemantauan kesehatan anak dan pemberian imunisasi tepat waktu guna mencegah *stunting*. Pemahaman masyarakat tentang pola asuh yang baik, termasuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan pemberian MPASI hingga usia 2 tahun, sangat menentukan keberhasilan pencegahan *stunting* (Putri & Wahyuni, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk tersebut dapat membantu menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu komunitas.

3. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *stunting* dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan *stunting*. Kepala dukuh sebagai pemimpin lokal berfungsi memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kesehatan, sering kali menjadi fasilitator utama dalam kampanye kesehatan di desa (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023). Organisasi wanita seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan mengenai gizi seimbang dan kesehatan anak, termasuk pelatihan memasak makanan sehat dan penyuluhan gizi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023).

Kader kesehatan bertugas memberikan informasi medis dan mendukung penerapan praktik sehat di masyarakat, bekerja sama dengan

tenaga medis untuk memastikan penyampaian informasi pencegahan *stunting* yang efektif (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023). Keterlibatan tokoh masyarakat ini sangat strategis untuk mencapai hasil optimal dalam penanggulangan *stunting* (Marni et al., 2023; Syafi'ie, 2024).

4. Pelaksana Kegiatan

Tinjauan pustaka mengenai pelaksana kegiatan upaya penanggulangan masalah *stunting* berbasis pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa kader dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memainkan peran penting dalam pelaksanaan program-program pencegahan *stunting*. Kader kesehatan, sebagai tenaga medis terdekat, bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan informasi medis kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan praktik kesehatan yang baik. Mereka sering kali bekerja sama dengan tenaga medis untuk memastikan bahwa informasi mengenai pencegahan *stunting* disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI), kader kesehatan juga membantu memantau pertumbuhan anak dan memberikan saran kepada orang tua tentang cara-cara meningkatkan asupan gizi anak mereka (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan *Stunting*, 2022).

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebagai organisasi wanita di tingkat kalurahan, berperan dalam menyediakan pelatihan dan

edukasi tentang gizi seimbang serta mendukung penerapan praktik sehat di rumah. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mencakup pelatihan memasak makanan sehat, penyuluhan tentang pentingnya gizi bagi tumbuh kembang anak, dan kampanye kesehatan lainnya. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memainkan peran vital dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam program-program kesehatan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan *Stunting*, 2022). Keterlibatan kader dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penanggulangan *stunting*.

5. Peran keluarga

Tinjauan pustaka mengenai peran keluarga dalam penanggulangan masalah *stunting* menunjukkan bahwa keluarga berperan krusial dalam pencegahan dan penanganan *stunting*. Keluarga memiliki peran penting mulai dari janin dalam kandungan, bayi, balita, hingga anak-anak yang lebih besar. Menurut Henny Suzana Mediani, PhD dari Universitas Padjadjaran, keluarga berperan dalam memberikan nutrisi yang optimal kepada anak, mulai dari ibu hamil yang perlu mendapatkan gizi terbaik hingga pemberian ASI eksklusif dan makanan bernutrisi pada anak usia 6 bulan (Mediani, 2020).

Selain itu, keluarga juga perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai gizi dan kesehatan anak, serta menjalankan pola pengasuhan

yang baik. Dampak intervensi gizi yang dilakukan oleh keluarga memiliki kontribusi lebih besar dalam pencegahan *stunting* dibandingkan dengan intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional (Mediani, 2020). Lebih lanjut, dukungan emosional dan psikologis dari keluarga sangat penting dalam memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental yang sehat. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan bagi keluarga mengenai pentingnya gizi dan kesehatan anak menjadi kunci utama dalam penanggulangan *stunting*.

6. Peran Pemerintah

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan permasalahan gizi masyarakat. Melalui program-program seperti edukasi gizi, pemantauan status gizi, penyuluhan, serta intervensi langsung terhadap kelompok rawan seperti ibu hamil dan balita, Puskesmas menjadi ujung tombak dalam perbaikan gizi masyarakat (Miza, Kolopaking & Hakim, 2023). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas seperti penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan juga memperlihatkan kontribusi nyata dalam mendorong kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Strategi kelembagaan yang diterapkan oleh Puskesmas, seperti koordinasi lintas sektor, mendukung keberlanjutan program gizi yang bersifat partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal (Miza, Kolopaking & Hakim, 2023). Oleh karena itu, peran Puskesmas tidak hanya bersifat

kuratif tetapi juga promotif dan preventif dalam konteks kesehatan gizi masyarakat.

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki kewenangan besar dalam menciptakan inovasi model pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan dan meratakan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan melalui revitalisasi sistem kesehatan dasar, di antaranya dengan memperluas jaringan pelayanan yang efektif dan efisien, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan serta kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk sistem yang komprehensif, serta perbaikan sistem informasi kesehatan di semua tingkatan pemerintahan (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Fungsi puskesmas meliputi tiga aspek utama, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama (Depkes RI, 2009). Dari fungsi ini terlihat bahwa peran puskesmas tidak hanya menyangkut aspek teknis medis, tetapi juga keterampilan sumber daya manusia dalam mengorganisir modal sosial masyarakat. Untuk itu, strategi pengorganisasian masyarakat menjadi kunci agar penyelenggaraan kesehatan bisa dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan (Notoatmodjo, 2012).

B. Kerangka Teori

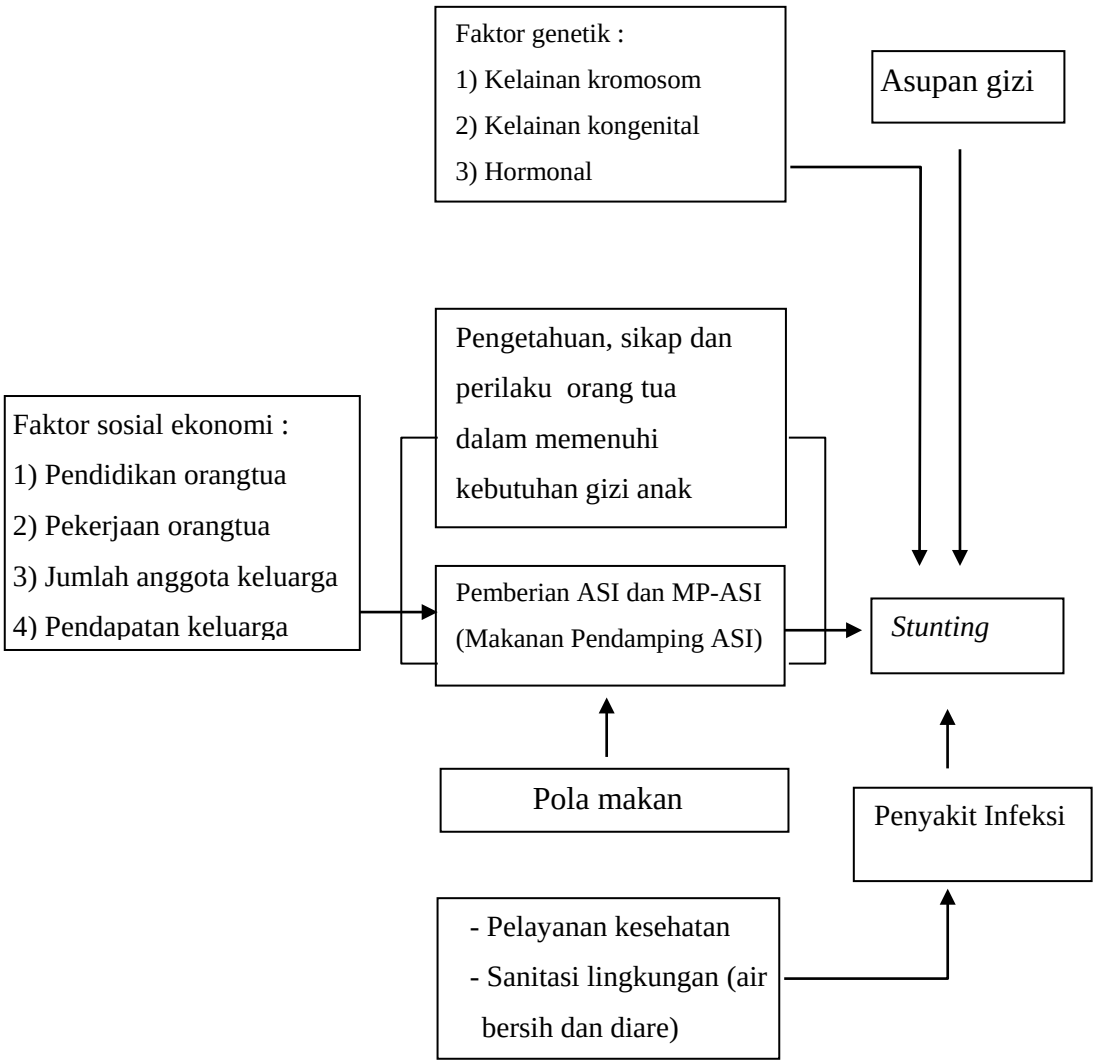

Notoatmodjo, S. (2010)

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

C. Kerangka Konsep

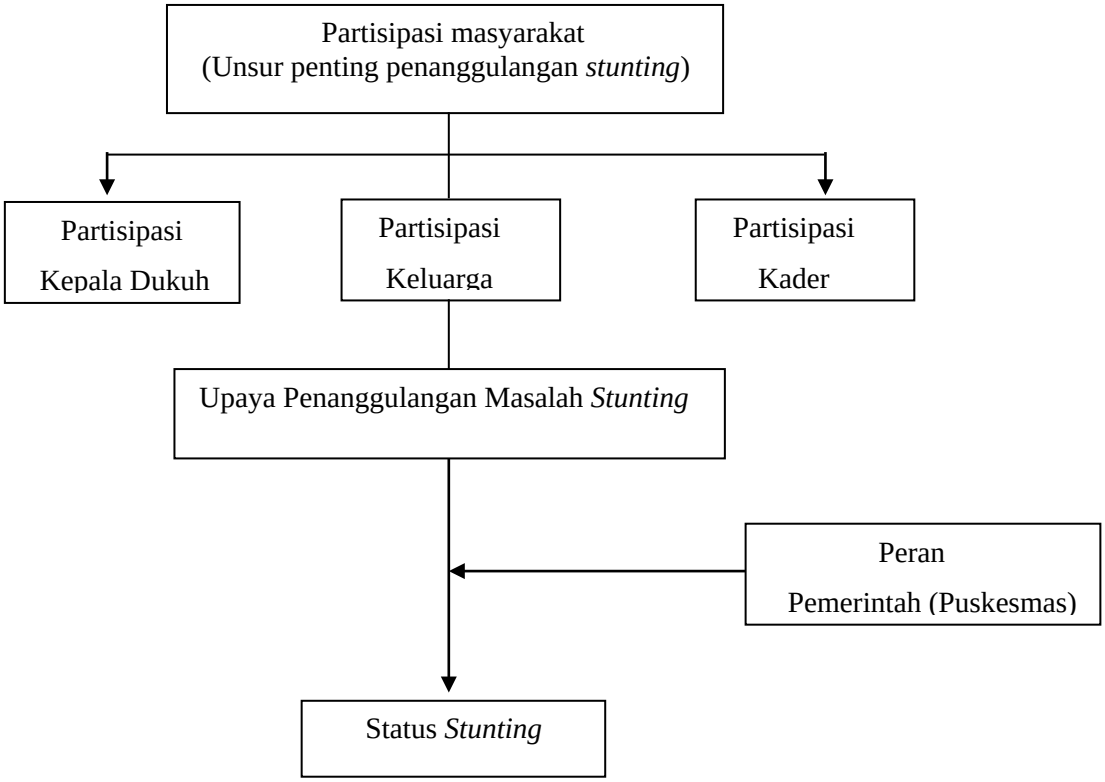

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

D. Pernyataan Penelitian

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan *stunting* meliputi kegiatan langsung maupun tidak langsung dalam mendukung tumbuh kembang anak.
2. Unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan *stunting* mencakup individu maupun kelompok, termasuk ibu balita, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah kalurahan.
3. Kader posyandu memiliki peran penting dalam penanggulangan *stunting*, meliputi edukasi, pemantauan pertumbuhan balita, dan penyuluhan gizi.
4. Kader telah mendapatkan pelatihan terkait pemantauan balita *stunting*,

yang mendukung peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas.

5. Ibu balita berperan aktif dalam penanggulangan *stunting*, terutama melalui pemberian asupan gizi dan keikutsertaan dalam program posyandu.
6. Motivasi ibu balita untuk datang ke posyandu dipengaruhi oleh kesadaran akan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak dan layanan kesehatan gratis.
7. Tindakan yang diambil ibu balita ketika anak mengalami *stunting* meliputi konsultasi ke tenaga kesehatan dan mengikuti anjuran.
8. Ibu balita memiliki harapan agar penanggulangan *stunting* dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan yang merata dari pemerintah dan masyarakat.
9. Kepala dukuh berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam upaya penanggulangan *stunting* di tingkat wilayah.
10. Berbagai wadah organisasi seperti posyandu, PKK, dan karang taruna menjadi sarana dalam mendukung program penanggulangan *stunting*.
11. Puskesmas sebagai perwakilan pemerintah memiliki peran utama dalam memberikan layanan kesehatan, edukasi, dan pemantauan kasus *stunting*.
12. Ibu balita menilai bahwa upaya penanggulangan *stunting* di kalurahan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.